

## Perbandingan Administrasi Pembangunan Indonesia Dan India

Shifa Nursahwa<sup>1</sup>, Dede Mardiah<sup>2</sup>, Fira Putri Renggani<sup>3</sup>, Neni Nuraeni<sup>4</sup>, Muhamad Adli Mu'afa<sup>5</sup>, Agung M. Yusup<sup>6</sup>, Neng Virly Apriliyani<sup>7</sup>.

<sup>1234567</sup>Universitas Djuanda

Korespondensi: [rengganifira@gmail.com](mailto:rengganifira@gmail.com), [dmardiah422@gmail.com](mailto:dmardiah422@gmail.com),  
[12syifanursahwa@gmail.com](mailto:12syifanursahwa@gmail.com)

---

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas Administrasi Pembangunan sebagai instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di Indonesia dan India. Administrasi Pembangunan berperan dalam pengembangan sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur, serta membentuk hubungan internasional yang strategis. India dan Indonesia, dua negara dengan populasi terbesar di dunia, menghadapi tantangan dan peluang unik dalam administrasi pembangunan. India, dengan jumlah penduduk yang tinggi, berfokus pada peningkatan infrastruktur kesehatan dan pemerataan tenaga medis, meskipun masih menghadapi tantangan ketidaksetaraan antarwilayah. Indonesia, sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan geografis yang unik dalam menyediakan akses layanan yang merata di seluruh wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perbedaan sistem administrasi pembangunan kedua negara. Melalui perbandingan ini, artikel ini mengeksplorasi bagaimana masing-masing negara mengatasi kendala yang ada dan mengidentifikasi aspek-aspek kunci yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, ekonomi, serta hubungan internasional.

**Kata Kunci:** Administrasi Pembangunan, Indonesia, India, Pembangunan Nasional,

### PENDAHULUAN

Atmosoedirjo menyatakan bahwa Administrasi Pembangunan adalah sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara. Melalui Administrasi Pembangunan suatu negara dapat mencapai tujuan pembangunan negara itu sendiri baik pembangunan Infrastruktur,

Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial Budaya atau bahkan hubungan internasional negara tersebut dengan negara lainnya. Edward Weidner memandang Administrasi Pembangunan dalam pemerintahan sebagai proses membimbing organisasi menuju pencapaian tujuan politik, ekonomi dan sosial yang progresif dan ditentukan secara otoritatif dalam satu atau lain cara. Yang mana seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia dan India merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, dengan jumlah populasi negara Indonesia sebanyak 282.477.584 jiwa dan populasi negara India sebanyak 1.442.857.230 jiwa ini menunjukkan bahwa kedua negara memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga tentu penyelenggaraan serta pembangunan di kedua negara memiliki beberapa perbedaan dalam menangani permasalahan sosial dari sudut pandang pembangunan nasional masing-masing negara.

Administrasi pembangunan negara adalah salah satu kunci yang penting untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan. India dan Indonesia yang merupakan negara berkembang memiliki kesulitan dan peluang yang berbeda dalam proses administrasi pembangunan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor 1 di dunia, India menghadapi masalah menantang seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, dan infrastruktur yang perlu diperbaiki. Namun, dengan sumber daya manusia yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi, India memiliki potensi besar. Hal ini mengharuskan Pemerintah India melakukan pengembangan pembangunan dalam berbagai aspek yaitu, kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, sumber daya manusia, dan hubungan internasional.

Di Indonesia, pembangunan adalah komponen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang tidak biasa. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau, Administrasi pembangunan Indonesia harus mempertimbangkan keragaman lokal dan kemudahan layanan. Di Indonesia,

desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, pembangunan yang tidak merata dan akses terhadap layanan dasar masih menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu dengan permasalahan dan aspek pembangunan yang berbeda di negara Indonesia & India, pada kesempatan kali ini penulis akan membandingkan Administrasi Negara Indonesia dengan India.

India, sebagai salah satu negara terbesar dan berpengaruh di Asia, memiliki karakteristik hubungan internasional yang unik dan kompleks. Sejak era Perang Dingin, India telah mengadopsi kebijakan non-alignment yang memungkinkan negara ini mempertahankan otonomi strategis dalam kebijakan luar negerinya. (Angela 2016) Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia dan anggota G20, juga memiliki pendekatan hubungan internasional yang khas. Mirip dengan India, Indonesia menganut prinsip non-alignment yang tercermin dalam kebijakan luar negeri bebas-aktif, artinya tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun sambil tetap aktif dalam diplomasi internasional. (Zaman 2015) Indonesia memainkan peran penting dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dan berupaya mempromosikan stabilitas regional melalui diplomasi dan kerjasama ekonomi. Indonesia mengutamakan diplomasi ekonomi dengan memperkuat hubungan perdagangan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam penggunaan soft power, Indonesia menonjolkan kekayaan budayanya yang beragam, pariwisata, serta peran aktif dalam dialog antaragama dan antarbudaya.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode literatur atau studi pustaka dengan jenis metode kualitatif deskriptif. Studi literatur ini berkaitan dengan perbandingan Administrasi Pembangunan Indonesia dan India. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan menyusun dan mengumpulkan fakta. Tujuan

Artikel ini adalah untuk mengetahui perbedaan sistem pembangunan negara Indonesia dan India yang memiliki populasi penduduk terbesar di dunia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Aspek Kesehatan

- India

Salah satu aspek pembangunan nasional di negara India adalah Sistem Kesehatan, pelayanan serta sistem kesehatan di India menganut model *universal multi payer healthcare*, ini adalah sebuah model pelayanan kesehatan di India yang mana seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat didanai oleh pemerintah yang juga berkolaborasi dengan swasta (Yulianti et al., 2021), berdasarkan survey yang dilakukan bahwa di India memiliki perlindungan resiko hanya 17,9 % dan cakupan pengobatan serta pencegahan suatu kondisi kesehatan hanya 83,5 %, akan tetapi meskipun begitu India total pengeluaran India tetap pada 4.7% dari produk domestik bruto (PDB) (Zodpey & Farooqui, 2018). Sistem kesehatan di india sendiri seutuhnya belum tersebar secara merata hal ini di tunjukan dengan penyebaran Apotek yang hampir 75% berada di wilayah perkotaan, serta terdapat 60% persebaran rumah sakit yang juga berada di perkotaan, tidak sampai disitu hampir sepertiga dokter di India melayani populasi perkotaan (Kashyap, 2018). Permasalahan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan ini juga tentunya merupakan permasalahan yang serius, karena apabila persebaran rumah sakit saja tidak merata maka menimbulkan permasalahan lainnya, yaitu persebaran infrastruktur kesehatan yang buruk dimana terdapat perbandingan antara satu rumah sakit milik negara yang di peruntukan untuk 90.343 orang di India (Kashyap, 2018).

Selain menghadapi permasalahan global seperti presesntase anggaran biaya kesehatan yang kurang, kesenjangan perkotaan dan pedesaan dan infrastruktur kesehatan yang buruk. India juga menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan yang ada karena untuk membangun

sistem kesehatan yang semakin baik tentunya hal pertama yang perlu di penuhi adalah SDM yang memadai dan ahli di bidang medis, akan tetapi di india sendiri ketidak merataan tenaga medis seperti dokter masih menjadi permasalahan yang cukup rumit terutama kelangkaan dokter yang tersedia di daerah pedalaman atau pedesaan yang terbilang masih sangat kurang, tentunya hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk membenahi permasalahan tersebut. Namun meskipun begitu dengan upaya pemerintah serta dukungan dari beberapa pihak dengan melakukan pendaan yang lebih baik, sehingga sistem layanan kesehatan di India mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam bidang layanan kesehatan universal serta angka kematian dan kesakitan.

- Indonesia

Sistem kesehatan di Indonesia telah tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 72 Tahun 2012 menyatakan bahwa Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan (Sistem Kesehatan , 2012). Selain itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 meyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang mengatur penyelenggaraan Sistem Kesehatan di Indonesia diantaranya sseperti meningkatkan kesehatan masyarakat, memberikan Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, meningkatkan Sumber daya manusia melalui kesehatan, Teknologi kesehatan, Sistem informasi kesehatan, Pendanaan kesehatan, melibatkan Partisipasi masyarakat dan Pembinaan & pengawasan (Sistem Kesehatan , 2012). UU Nomor 17 tahun 2023 memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan data dan informasi kesehatan dari setiap individu. Pembangunan kesehatan dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM yang melimpah di Indonesia melalui bidang kesehatan, selain itu pembangunan kesehatan di indonesia dilakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional serta kesejahteraan bangsa Indonesia yang telah tertera dalam pembukaan UUD 1945(Yulianti et al., 2021).

Sejak tanggal 1 Januari tahun 2014 telah diberkalukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan program JKN di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia (Dinkes Kulon Progo, 2021), terhitung sejak 1 Agustus 2024 bahwa pengguna JKN di Indonesia menyentuh angka 276.520.647 jiwa, atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia (DJSN, 2024), artinya dengan jumlah pengguna JKN yang tertera maka dapat di katakan bahwa JKN merupakan jalan komitmen negara Indonesia dalam menjamin kesehatan dari setiap penduduknya. Dengan ditetapkannya JKN di Indonesia Sistem Kesehatan di Indonesia dalam pelaksanaanya tentu masih memiliki ketertinggalan dengan negara-negara lainnya yang lebih maju, penerapan JKN di Indonesia sebagai salah satu program yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nyatanya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat jalannya sistem Kesehatan yang baik di Indonesia. Seperti terjadinya diskriminasi terhadap pasien pengguna layanan jaminan kesehatan, diskriminasi yang dilakukan seringkali terjadi kepada pasien pengguna asuransi kesehatan seperti BPJS, bentuk diskriminasi yang terjadi yaitu seperti pelayanan yang kurang optimal, kesopan santunan dan ramah tamah dari para nakes (Yulianti et al., 2021). Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia yang tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial mereka, selain dari itu hal tersebut juga sangat berbanding terbalik dengan prinsip kelembagaan BPJS yang merupakan lembaga pemberi layanan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Sistem kesehatan di Indonesia ini selain menghadapi permasalahan diskriminasi akan tetapi terdapat permasalahan lainnya yang juga merupakan masalah yang serius dalam proses pembangunan kesehatan di Indonesia yaitu seperti keterbatasan kemampuan dan kurangnya dokter yang menjadi hambatan dalam pelayanan kesehatan melalui JKN di Indonesia tidak hanya keterbatasan sumber dayanya saja

akan tetapi terdapat beberapa keterbatasan Fasilitas kesehatan di Indonesia dan terdapat kesenjangan infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan yang menjadi faktor penghambat pembangunan kesehatan di Indonesia. Meskipun Sistem Kesehatan di Indonesia mengalami beberapa permasalahan yang ada dimulai dari diskriminasi terhadap pasien pengguna layanan jaminan kesehatan dengan pasien yang non JKN hingga ketidakmerataan tenaga kesehatan antara desa dan kota.

Namun kini Sistem Kesehatan di Indonesia terus berupaya dalam mengembangkan layanan kesehatan melalui transformasi kesehatan yang mencakup 6 jenis transformasi diantaranya adalah, Transformasi Layanan Primer yang merupakan pilar utama dalam transformasi kesehatan Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan lebih banyak orang sehat dan meningkatkan layanan kesehatan, Transformasi Layanan Rujukan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan diseluruh pelosok Indonesia melalui pembangunan rumah sakit, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan yang memegang peran penting untuk mempertahankan sistem kesehatan yang baik, Transformasi Sistem Pembiayaan Layanan Kesehatan yang berfokus untuk pemberian dan kesetaraan layanan kesehatan terutama bagi masyarakat golongan kurang mampu, Transformasi SDM Layanan Kesehatan yang terfokus untuk memastikan pemerataan penyaluran tenaga kesehatan ke seluruh pelosok negeri dan yang terakhir adalah Transformasi Teknologi Kesehatan yang memiliki peran penting yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi seputar dunia kesehatan (KEMENKES, 2021)

### **Aspek Infrastruktur**

Pada aspek pembangunan infrastruktur baik di negara India maupun Indonesia keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan konsep untuk membangun fasilitas publik, konsep yang digunakan yaitu Publik Privat Partnership. Konsep/Model Publik Privat Partnership sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1974 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah, sedangkan di negara India konsep/Model Publik Privat

Partnership sudah mulai diterapkan pada abad ke 21 untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas publik. Model Publik Privat Partnership merupakan bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur negara, di Indonesia badan yang berwenang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Dan dinegara India badan yang memfasilitasi kerjasama pihak swasta dan pemerintah ialah PPP Cell, kedua badan dari negara tersebut berperan penting dalam mendorong investasi pihak swasta dan memepercepat pembangunan infrastruktur bagi kedua negara tersebut.

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menunjang fasilitas publik suatu negara. Berikut data perbandingan infrastruktur/fasilitas publik yang telah dibangun di negara India dan Indonesia.

INDONESIA	INDIA
<p>Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalan Raya: Pembangunan dan preservasi jalan nasional, provinsi dan kabupaten untuk membuka akses jalan antar daerah.</li> <li>● Jembatan: Pembangunan jembatan untuk menghubungkan daerah terpencil dan dapat membuka jalan alternatif yang dekat.</li> <li>● Kereta api: Pengembangan jalur kereta api antar kota, termasuk proyek kereta cepat (KRL dan MRT) dan kereta ringan (LRT).</li> <li>● Bandara: Peningkatan dan pengembangan bandara untuk memperlancar transportasi udara dan dapat mendukung pariwisata Indonesia.</li> </ul>	<p>Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Jalan Raya: Pembangunan jalan tol dan jalan nasional untuk meningkatkan perekonomian.</li> <li>● Kereta api: Modernisasi jaringan kereta api dan pembangunan kereta cepat.</li> <li>● Bandara: Pembangunan dan peningkatan fasilitas bandara internasional dan domestik.</li> </ul>
Energi	Energi:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangkit Listrik: Pembangunan pembangkit listrik tenaga air, dan geothermal untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.</li> <li>• Distribusi Listrik: Memperluas jaringan distribusi listrik ke daerah yang belum terlayani untuk mengurangi pemadaman listrik yang sering terjadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangkit Listrik: Pembangunan proyek Jawaharlal Nehru National Solar Mission (Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin).</li> <li>• Distribusi Listrik: Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (Pengembangan akses listrik daerah terpencil).</li> </ul>
<p>Air dan Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Air Bersih: Penyediaan air bersih khususnya di pedesaan guna meningkatkan kesehatan masyarakat.</li> <li>• Sanitasi: Pengelolaan limbah untuk mencegah penyebaran penyakit.</li> </ul>	<p>Air dan Sanitasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan Air Bersih: Jal Jeevan Mission (Program akses penyediaan air bersih).</li> <li>• Sanitasi: Swachh Bharat Mission (Pembangunan fasilitas sanitasi dan kebersihan).</li> </ul>
<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit dan Puskesmas: Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan sehingga masyarakat merasa nyaman.</li> </ul>	<p>Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Sakit dan Klinik: Program Ayushman Bharat (Pembangunan peningkatan fasilitas layanan kesehatan).</li> </ul>
<p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah: Pengembangan fasilitas sekolah dasar, menengah, tinggi, dan pemabangunan sekolah negeri di daerah terpencil.</li> <li>• Fasilitas Pelatihan: Pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas SDM.</li> </ul>	<p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekolah dan Universitas: Pembangunan gedung sekolah bagi di daerah terpencil.</li> <li>• Fasilitas Pelatihan: Pusat pelatihan keterampilan melalui inisiatif <b>Skill India</b></li> </ul>
<p>Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perumahan: Pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat.</li> </ul>	<p>Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pradhan Mantri Awas Yojana: Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</li> </ul>
<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur Digital: Pembangunan jaringan internet &amp; telekomunikasi,</li> </ul>	<p>Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>

seperti jaringan serat optik palapa ring.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Digital India: Pembangunan infrastruktur digital dan akses internet di India.</li> </ul>
<p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelolaan Sampah: Pembangunan inovasi teknologi pengelolaan sampah dan program daur ulang.</li> <li>● RuanTerbuka Hijau: Pemabangunan ruang terbuka hijau di perkotaan.</li> </ul>	<p>Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelolaan sampah: Pembangunan smart city.</li> </ul>

Sumber: (Abdullah 2020)

Dalam pemabangunan infrastruktur fasilitas publik, kedua negara sering menghadapi permasalahan dalam perencanaan maupun proses pelaksanaanya. Di negara Indonesia permasalahan yang terjadi ialah Kurang koordinasi dalam pembangunan infrastruktur. Fasilitas infrastruktur di Indonesia sering sekali tidak bertahan lama karena bahan material yang digunakan dalam pembangunan kurang baik. Selain itu, pembangunan infrastruktur seringkali terhambat karena kurangnya biaya, kebocoran dana anggaran serta lamanya proses pencairan dana. Namun di Indonesia sendiri pemerintah sudah menerapkan sistem transparansi dimana masyarakat dapat mengakses informasi mengenai jumlah anggaran yang digunakan dalam suatu proyek dan diperuntukan untuk apa saja anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini dapat menghindari kebocoran dana dan korupsi. Pemerintah indonesia juga sudah mulai memperbaharui dan melakukan inovasi terhadap bahan material untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan Kabupaten di wilayah Indonesia menggunakan beton sehingga tidak mudah rusak dan berlubang.

Sedangkan dinegara India permasalahan yang dihadapi dalam pemabangunan infrastruktur yaitu pendanaan yang tidak memadai, pendanaan dari pemerintah sering kali tidak mencukupi, dan keterlibatan sektor swasta masih terbatas. Dan juga keterbatasan kapasitas pihak swasta, banyak SDM pihak swasta di kota-kota besar India kurang menguasai kompetensi untuk mengelola dan melaksanakan proyek infrastruktur skala besar, hal ini mengakibatkan proyek yang tertunda atau tidak selesai tepat waktu. Namun pemerintah india telah melakukan beberapa cara untuk

menarik minat sektor swasta dalam menjalin kerjasama. Pemerintah India menawarkan rencana pembiayaan yang merik seperti insentif pajak, jaminan pendapatan minimum bagi pihak swasta yang ingin berkerja sama. Selain itu pemerintah India juga menyederhanakan proses perizinan dan pengadaan serta mengurangi birokrasi yang dapat menghambat investasi. Dalam peningkatan kapasitas SDM pemerintah India mengadakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.

### Aspek Ekonomi

Diplomasi ekonomi merupakan elemen krusial dalam relasi antarnegara. Di era proteksionisme yang meningkat, negara-negara berupaya melakukan diplomasi ekonomi untuk memajukan perdagangan dan mendapatkan akses ke pasar-pasar baru. Diplomasi ekonomi tetap relevan dalam pembentukan kebijakan internasional modern. Coolsaet menekankan bahwa diplomasi ekonomi mendapat perhatian lebih pada dekade 1990-an, sebuah fakta yang diperkuat oleh survei tahun 1998 yang menyoroti fokus kementerian luar negeri dunia terhadap aspek ekonomi dalam diplomasi (Coolsaet, 2004). Tujuan-tujuan ekonomi ini meliputi pencarian akses pasar, pengurangan hambatan tarif, fasilitasi investasi, serta peningkatan volume perdagangan.

Berikut merupakan beberapa indicator perbandingan dalam aspek ekonomi antara Indonesia dan India

Indonesia	India
<p>Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tahun 2016 tingkat ekspor mencapai \$144,489,796.42 ribu.</li> <li>● Pada tahun 2017, total ekspor Indonesia mencapai \$168,810,042.93 ribu.</li> </ul>	<p>Ekspor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tahun 2016 tingkat ekspor India mencapai \$260,326,912.34 ribu.</li> <li>● Pada tahun 2017, total ekspor India mencapai \$294,364,490.16 ribu.</li> <li>● Dilihat dari sebaran kawasan, ekspor terbesar India adalah ke</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dilihat dari sebaran kawasan, ekspor terbesar Indonesia adalah ke Kawasan Asia Timur &amp; Pasifik, yaitu sebesar 54,87% pada 2016 dan 55,8% pada 2017.</li> <li>• Kawasan lain yang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia adalah Eropa &amp; Asia Tengah serta Amerika Utara.</li> </ul>	<p>Kawasan Asia Timur &amp; Pasifik, yaitu sebesar 22,75% pada 2016 dan 25,89% pada 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan lain yang menjadi tujuan ekspor utama India adalah Amerika Utara serta Eropa &amp; Asia Tengah.</li> </ul>
<p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan PDB Indonesia sering kali berada di kisaran 5-6% per tahun. Sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan.</li> </ul>	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pertumbuhan PDB yang lebih tinggi, seringkali mencapai 7-8% per tahun, didorong oleh sektor teknologi informasi, jasa, dan industri manufaktur.</li> </ul>
<p>Pendapatan Per Kapita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2023, pendapatan per kapita Indonesia sekitar \$4,500 - \$5,000.</li> </ul>	<p>Pendapatan Per Kapita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan per kapita India pada tahun 2023 diperkirakan sekitar \$2,500 - \$3,000.</li> </ul>
<p>Tingkat Pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Indonesia berkisar antara 5–6%. Meskipun ada fluktuasi akibat faktor ekonomi global dan dampak pandemi, pemerintah berupaya menurunkan angka ini</li> </ul>	<p>Tingkat Pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun yang sama, tingkat pengangguran di India diperkirakan sekitar 7–8%. Angka ini lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan, dan terdapat variasi besar antar negara bagian.</li> </ul>

<p>melalui program penciptaan lapangan kerja.</p>	
<p>Inflasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2023, tingkat inflasi Indonesia berkisar antara 4-5%. Inflasi ini dipengaruhi oleh harga bahan makanan dan energi, serta kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia.</li> </ul>	<p>Inflasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun yang sama, tingkat inflasi India sekitar 5-6%. Inflasi ini sering kali lebih volatile karena ketergantungan pada harga makanan dan energi, terutama minyak</li> </ul>
<p>Investasi Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aliran FDI ke Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sekitar \$25-30 miliar.</li> <li>• Sektor-sektor yang menarik bagi investor asing termasuk infrastruktur, energi terbarukan, manufaktur, dan teknologi informasi.</li> <li>• Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi untuk meningkatkan iklim investasi, termasuk penyederhanaan regulasi dan pengurangan birokrasi.</li> </ul>	<p>Investasi Asing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• India mencatat aliran FDI yang lebih tinggi, sekitar \$80-90 miliar pada tahun 2023.</li> <li>• Sektor teknologi informasi, layanan kesehatan, dan manufaktur menjadi area yang sangat diminati oleh investor asing.</li> <li>• India juga menarik investasi dalam sektor infrastruktur, terutama melalui program seperti "Make in India."</li> </ul>

Sumber: (Poerwantika & Kotwhani, 2019)

Secara umum, tabel ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun India memiliki kemampuan dan potensi ekspor yang besar, dengan fokus utama ke kawasan Asia Timur & Pasifik. Namun, terdapat perbedaan komposisi ekspor di antara kedua negara tersebut.

## **Aspek Pendidikan**

Aspek pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan negara, dengan pendidikan maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan siap berkontribusi dalam berbagai bidang. Begitu juga dengan aspek pendidikan di India dan Indonesia kedua negara ini memiliki beberapa kesamaan dalam aspek pendidikan, tetapi banyak pula perbedaan yang mencerminkan keadaan sosial, ekonomi, dan kebijakan pendidikan di kedua negara tersebut.

Aspek pendidikan di Indonesia maupun India melakukan perubahan pada struktur pendidikan tinggi untuk mendorong pembangunan negara tersebut. Pendaftaran pendidikan tinggi di India telah meningkat dari hanya 397.000 mahasiswa di 30 universitas dan 695 perguruan tinggi pada tahun 1950-an menjadi 564 universitas dan 33.023 mahasiswa pada tahun 2010-2011.

Hal ini menunjukkan bahwa universitas berada di garis depan dalam sistem pendidikan tinggi India. Di Indonesia, angka partisipasi pada tahun 1985 hanya 9% atau sekitar 500.000 mahasiswawa. Peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2010, dan mencapai 26% atau sekitar 5.226 juta mahasiswa dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 3.089.

Upaya Indonesia dan India dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan tinggi dihadapkan pada permasalahan krisis ekonomi yang melanda India pada tahun 1991 dan Indonesia pada tahun 1998. Krisis ekonomi memaksa India dan Indonesia menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang mencerminkan desentralisasi dan liberalisasi sektor pendidikan tinggi.

Privatisasi dan komersialisasi PTN di kedua negara. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan sumber pendanaan regional bagi India dan Indonesia untuk membiayai pendidikan tinggi di negara tersebut. Meskipun terdapat kesamaan namun, setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam struktur dan pelaksanaan sistem pendidikan mereka. Dalam bagian ini akan dibahas perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dan India dari berbagai aspek:

Aspek	India	Indonesia
Struktur Pendidikan	10 + 2 + 3 (10 tahun pendidikan dasar + 2 tahun pendidikan menengah + 3 tahun perguruan tinggi)	6 + 3 + 3 + 4 (6 tahun pendidikan dasar + 3 tahun SMP + 3 tahun SMA/SMK + 4 tahun perguruan tinggi)
Pendidikan Dasar	Wajib dan gratis hingga kelas 8 (usia 6-14 tahun)	Wajib dan gratis selama 9 tahun (SD dan SMP)
Bahasa Pengantar	Bahasa Hindi, Inggris, dan bahasa daerah	Bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah diperbolehkan pada tingkat pendidikan dasar di beberapa daerah
Kurikulum Nasional	Dikembangkan oleh Dewan Pendidikan India (CBSE, ICSE) dan dinas pendidikan negara bagian	Dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kurikulum Nasional yang sama di seluruh Indonesia
Pendidikan Menengah	Menawarkan dua jalur: akademik dan vokasional, dengan ujian dewan nasional di akhir Kelas 12	Terdiri dari SMA (akademik) dan SMK (vokasional), dengan ujian nasional di akhir SMA/SMK
Ujian Nasional	Ujian Dewan Nasional di Kelas 10 dan Kelas 12 (CBSE,	Ujian Nasional diganti dengan Asesmen

	ICSE, atau dewan negara bagian)	Nasional berbasis kompetensi literasi dan numerasi
Perguruan Tinggi	Terdiri dari universitas, perguruan tinggi teknik, dan institut manajemen (IIT, IIM, dan lain-lain)	Terdiri dari universitas negeri dan swasta, institut teknologi, akademi, dan politeknik
Bahasa di Perguruan Tinggi	Sebagian besar menggunakan bahasa Inggris, terutama di institusi unggulan	Menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi beberapa program menggunakan Bahasa Inggris
Standar Pendidikan	Beragam, dengan institusi unggulan seperti IIT dan IIM diakui di tingkat global	Beragam, dengan universitas negeri terkemuka seperti Universitas Indonesia dan ITB diakui di Asia
Tantangan Utama	Ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan infrastruktur, dan tekanan ujian kompetitif	Ketimpangan pendidikan di daerah terpencil, keterbatasan fasilitas, dan kendala implementasi kurikulum
Pendidikan Vokasi	Mulai dikembangkan melalui program nasional, tetapi masih tertinggal dari segi popularitas	Sudah terstruktur di SMK, namun masih dalam pengembangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan

		industri
Pendidikan Swasta	Sekolah swasta berkembang pesat, terutama di daerah perkotaan, dengan standar dan biaya beragam	Sekolah swasta menjadi alternatif populer, namun kualitasnya bervariasi, dan lebih terjangkau dibandingkan India
Anggaran Pendidikan	Sekitar 3-4% dari PDB, dengan fokus pada program Digital India dan infrastruktur pendidikan	Sekitar 20% dari APBN, dengan prioritas pada pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas guru
Fokus Pembelajaran	Kebijakan Pendidikan Nasional 2020 di India fokus pada pendekatan holistik dalam pembelajaran.	Sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung lebih akademik meskipun telah mengalami beberapa reformasi. Fokus utamanya adalah pada penguasaan pengetahuan teoretis.

Sumber: (Agasta 2024)

Tabel di atas memberikan gambaran umum tentang perbedaan utama dalam sistem pendidikan antara India dan Indonesia. Setiap negara memiliki pendekatan unik dalam menangani pendidikan yang mencerminkan tantangan, kebutuhan, dan prioritas lokalnya.

India dan Indonesia, sama-sama berupaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses bagi semua kalangan masyarakat. Walaupun

terdapat beberapa perbedaan dalam aspek dan prioritas kebijakan, fokus yang utama tetap pada pemberdayaan sumber daya manusia, digitalisasi pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pemerataan akses pendidikan (Yumitro 2014).

Dengan tantangan dan peluang yang berbeda, kebijakan pendidikan di kedua negara tersebut berperan penting dalam upaya mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi era globalisasi.

### **Aspek Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia**

Indonesia merupakan sebuah negara yang didalamnya terdapat berbagai ragam suku yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak Budaya. Interaksi sosial dan kebiasaan/budaya antar warga di Indonesia tentunya merupakan salah satu hasil dari sejarah yang panjang, melibatkan pertemuan serta hubungan dari berbagai bangsa, agama, dan budaya dunia. Begitu pula, nasionalisme dan identitas kebangsaan Indonesia terbentuk, berkembang, dan diuji melalui sejarah panjang interaksi antar bangsa-bangsa, agama, dan budaya-budaya yang ada didunia. Hal ini menghasilkan perpaduan norma-norma lama yang baru didalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Beberapa norma lampau mungkin mulai tergantikan atau diperbarui, sementara norma-norma baru yang telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan telah berkembang sejalan dengan perkembangan zaman saat ini dan masa depan harus terus dimengerti, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam interaksi sosial dan budaya.

Dengan total sekitar 14.000 pulau, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia, dengan luas sekitar 2.000.000 km<sup>2</sup>. Diawali dari ujung barat (Sabang di Pulau Weh) hingga diujung timur (Merauke di Irian Jaya), jaraknya kurang-lebih 5.000 km. Indonesia ditinggali hampir 270 juta jiwa, menjadikannya negara dengan populasi terbanyak ke-lima setelah Cina, India, AS, dan Rusia. Dari 5 pulau dengan luas terbesar (Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian), Pulau Jawa adalah yang terbanyak dan padat penduduknya, sementara Irian Jaya adalah yang paling jarang penduduknya. Indonesia memiliki sekitar 409 suku dan etnik, serta 725 bahasa daerah, beberapa di antaranya sudah mulai hilang

atau hampir tidak digunakan lagi. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional yang menjadi bahasa pemersatu bangsa, yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi antar individu. Berbagai agama dan kebudayaan sebagian besar hidup dan berkembang didalam masyarakat yang plural.

Keberagaman ini membuat para ahli kebudayaan sulit memutuskan atau menetapkan apa yang disebut kebudayaan nasional. Akan tetapi secara umum, Melatoa (1997) merumuskan 3 jenis kebudayaan atau subkebudayaan yang ada didalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu:

- 1) Kebudayaan Nasional yang mengikuti Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Kebudayaan suku dan bangsa; serta
- 3) Kebudayaan lokal yang umum menjadi tempat untuk mempertahankan plural ciri khas suku bangsa dan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan tinggal atau menetap didalam suatu wilayah, seperti pasar atau kota (Melatoa, 1997: 6).

Harsya W. Bachtiar (1985: 1-17) mengidentifikasi adanya 4 jenis sistem budaya yang berkembang di Indonesia, yaitu:

- 1) sistem budaya etnik, yang asalnya dari berbagai etnik dengan wilayah budayanya tersendiri (masyarakat etnik atau lebih);
- 2) Sistem budaya agama-agama mayoritas, yang berasal dari praktik keagamaan Hindu, Buddha, Islamm, Kristen, dan Katolik;
- 3) Sistem budaya Indonesia, yang meliputi bahasa persatuan Indonesia (berasal dari Melayu), Penamaan Indonesia, Pancasila, dan UUD Republik Indonesia 1945; dan
- 4) sistem budaya asing, yang dipengaruhi oleh Hindia, Belanda, Arab, Cina, Amerika, Jepang, dan lainnya. (Helmy n.d.)

Ada beberapa hal yang menjadikan perbedaan Indonesia dengan India yaitu Sistem Kasta. Di Indonesia sistem kasta tidak ada hanya ada kelompok Kaya, Menengah, dan Miskin sedangkan di India ada beberapa sistem kasta yang tentunya dapat mempengaruhi sosial dan budaya masyarakat yang ada di India meski secara

hukum aturan tersebut telah dihapuskan namun hal tersebut sangat mempengaruhi kehidupan sosialnya.

### **Aspek Hubungan Internasional**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa India dan Indonesia memiliki beberapa kesamaan dalam pendekatan hubungan internasional, tetapi juga menunjukkan perbedaan signifikan dalam implementasi dan prioritas strategis mereka. Kedua negara menganut prinsip non-alignment, yang memungkinkan mereka menjaga otonomi strategis dalam kebijakan luar negeri. India, dengan konsep "strategic autonomy," berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Hal ini tercermin dalam kebijakan luar negeri India yang cenderung pragmatis dan fleksibel, menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terus berubah (Adi Bandono, Avando Bastari, and Okol Sri Suharyo 2021). Sementara itu, Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri bebas-aktif, yang artinya tidak berpihak pada kekuatan besar mana pun sambil tetap aktif dalam diplomasi internasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih independen dan beragam di panggung global.

Dalam bidang diplomasi ekonomi, kedua negara menunjukkan fokus yang kuat namun dengan pendekatan yang sedikit berbeda. India sangat aktif dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain, yang terlihat dari berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang diinisiasinya. India juga berupaya menarik investasi asing langsung (FDI) untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Berbagai inisiatif seperti Make in India dan Digital India bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonominya di kancah global. Di sisi lain, Indonesia juga mengedepankan diplomasi ekonomi tetapi lebih menitikberatkan pada perannya dalam ASEAN. Melalui ASEAN, Indonesia mendorong integrasi ekonomi regional dan memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara Asia Tenggara. Indonesia juga berusaha untuk menarik FDI, namun dengan fokus

pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif (. and Midhio 2023).

Perbedaan signifikan lainnya terlihat dalam kebijakan pertahanan kedua negara. India memiliki kebijakan pertahanan yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya, terutama dengan latar belakang konflik perbatasan yang belum terselesaikan dengan China dan Pakistan. India secara aktif meningkatkan kemampuan militernya melalui modernisasi peralatan dan teknologi militer, serta menjalin hubungan strategis dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Israel. Kemitraan ini melibatkan pembelian senjata canggih dan kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan. Sementara itu, Indonesia, meskipun tidak seagresif India dalam hal ini, juga memperkuat kemampuan pertahanannya terutama dalam menjaga kedaulatan wilayah maritimnya yang luas. Indonesia terlibat dalam berbagai latihan militer bersama dengan negara-negara sahabat dan berpartisipasi dalam operasi perdamaian internasional di bawah naungan PBB (Zaman 2015)

Selain itu, penggunaan soft power oleh kedua negara juga menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan fokus. India menonjolkan kekayaan budayanya melalui Bollywood, yoga, dan ajaran spiritual, serta memanfaatkan diaspora Indianya yang besar di berbagai negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Program-program seperti International Day of Yoga dan Festival India di berbagai negara adalah contoh bagaimana India mempromosikan budayanya di kancah internasional. Indonesia, di sisi lain, menonjolkan kekayaan budayanya yang beragam dan pariwisata. Indonesia juga aktif dalam dialog antaragama dan antarbudaya, mempromosikan toleransi dan pluralisme sebagai bagian dari citra nasionalnya. Festival budaya Indonesia, pameran pariwisata, dan inisiatif seperti Wonderful Indonesia adalah beberapa contoh bagaimana Indonesia menggunakan soft power untuk memperkuat posisinya di dunia internasional (Adi Bandono, Avando Bastari, and Okol Sri Suharyo 2021).

Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif ini, India dan Indonesia terus mengembangkan dan menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka untuk menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang ada. Kedua negara menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar yang sama dapat diimplementasikan dengan cara yang berbeda berdasarkan konteks regional dan kebutuhan nasional masing-masing. India lebih berfokus pada penguatan hubungan bilateral dengan negara-negara besar dan memperluas pengaruh ekonominya secara global, sementara Indonesia lebih memprioritaskan stabilitas dan kerjasama regional di Asia Tenggara. Kedua pendekatan ini mencerminkan strategi yang cermat dan responsif terhadap dinamika global yang terus berkembang (Angela 2016).

## **KESIMPULAN**

Dari enam aspek yang sudah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa Indonesia dan India, meskipun memiliki tantangan dan konteks yang berbeda, berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui administrasi pembangunan yang efektif. Dalam aspek kesehatan, kedua negara berjuang untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan, dengan India menghadapi ketidakmerataan dan Indonesia berfokus pada Jaminan Kesehatan Nasional. Di bidang infrastruktur, keduanya menerapkan model Publik Privat Partnership, namun Indonesia mengalami masalah koordinasi, sedangkan India menghadapi keterbatasan pendanaan. Dalam aspek ekonomi, India menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan menarik investasi asing lebih banyak dibandingkan Indonesia, yang berupaya meningkatkan ekspornya. Pendidikan menjadi fokus utama di kedua negara, dengan masing-masing berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di daerah terpencil. Terakhir, dalam hubungan internasional, kedua negara mengadopsi kebijakan non-alignment untuk menjaga otonomi dan memperkuat kerjasama strategis. Secara keseluruhan, pengembangan SDM dan kerjasama internasional menjadi kunci utama bagi keduanya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

## REFERENSI

- . Tantaraha, and I Wayan Midhio. 2023. "Indonesia-India Maritime Cooperation: Implications on Indonesia's Maritime Security from a Cultural Perspective." *Journal of Social and Political Sciences* 6(2): 125–34.
- Adi Bandonu, Avando Bastari, and Okol Sri Suharyo. 2021. "The Relations Concept of Indonesia-India; Political, Education, and Defense Perspective." *Global Journal of Engineering and Technology Advances* 7(3): 071–082.
- Angela, Alisan. 2016. "Pengaruh Diaspora India Terhadap Hubungan Bilateral India - Malaysia." *Wanua : Jurnal Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin* 5(1): 1–13.
- Yumitro, Gonda. 2014. "Reactualization of Indonesia- India Bilateral Relations." *Jurnal Hubungan Internasional* 3(1): 51–57.
- Zaman, Mohd Tahseen. 2015. "Socio-Cultural Relations Between India and Indonesia." *International Seminar and Conference 2015: The Golden Triangle (Indonesia-India-Tiongkok) (Interrelations in Religion, Science, Culture, and Economic.):* 66–69.
- Dinkes Kulon Progo. (2021). *Jaminan Kesehatan Nasional*.
- DJSN. (2024, June). Monthly Report Monitoring JKN. [https://Kesehatan.Djsn.Go.Id/Kesehatan/Doc/Laporan-Bulanan/Monthly\\_Report\\_JKN\\_06\\_2024.Pdf](https://Kesehatan.Djsn.Go.Id/Kesehatan/Doc/Laporan-Bulanan/Monthly_Report_JKN_06_2024.Pdf).
- Kashyap, K. (2018, January). Bagaimana Perusahaan Rintisan Berusaha Mengatasi Tantangan Layanan Kesehatan di India. <https://Www.Forbes.Com/Sites/Krnkashyap/2017/09/25/How-Startups-Are-Trying-to-Overcome-Indias-Healthcare-Challenges/#483661471548>.
- KEMENKES. (2021). TRANSFORMASI KESEHATAN INDONESIA. <https://Www.Kemkes.Go.Id/Id/Layanan/Transformasi-Kesehatan-Indonesia>.
- Sistem Kesehatan , Pub. L. No. 72 (2012).
- Yulianti, Anna., AG, R. Gabriela., & Meidiansyah, Ridwan. (2021). Perbandingan Sistem Kesehatan Negara di Indonesia, India dan Jepang. *Researchgate*.
- Zodpey, S., & Farooqui, H. H. (2018). Cakupan Kesehatan Universal di India: Kemajuan yang dicapai dan jalan ke depan. *Jurnal Penelitian Medis India* .